



# **PERATURAN DESA BALONGDOWO**

NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGDOWO TAHUN  
ANGGARAN 2026

**PEMERINTAH DESA BALONGDOWO**  
**KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2025**



KEPALA DESA BALONGDOWO  
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA BALONGDOWO  
NOMOR 09 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGDOWO  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BALONGDOWO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  8. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);

14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara

- Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Taun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
  27. Peraturan Desa Balongdowo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 6);
  28. Peraturan Desa Balongdowo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balongdowo Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Balongdowo Tahun 2021 Nomor 4);
  29. Peraturan Desa Balongdowo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Balongdowo Tahun 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGDOWO

Dan

KEPALA DESA BALONGDOWO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGDOWO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BALONGDOWO Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.282.698.152,00
2. Belanja Desa	Rp	2.232.254.328,77
Surplus/Defisit	Rp	50.443.823,23
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	229.556.176,77
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	280.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.443.823,23)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BALONGDOWO.

Ditetapkan di : Balongdowo  
Pada tanggal : 25 December 2025

PJ. KEPALA DESA BALONGDOWO,  
  
ARIEF DWI WINARKO, S.AP

Diundangkan di : Balongdowo  
Pada tanggal : 25 December 2025

SEKRETARIS DESA BALONGDOWO  
  
MOCH. YATIM S.AP

LEMBARAN DESA BALONGDOWO NOMOR 09 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BALONGDOWO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.187.898.152,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.282.698.152,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	749.696.837,34	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.053.517.337,48	
5.3.	Belanja Modal	347.040.153,95	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.232.254.328,77</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.443.823,23</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	229.556.176,77	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	229.556.176,77	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	280.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	280.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.443.823,23)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BALONGDOWO, 31 December 2025

PJ. KEPALA DESA BALONGDOWO



ARIEF DWI WINARKO, S.AP

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA BALONGDOWO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.187.898.152,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.282.698.152,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.260.026.661,82</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>993.068.511,82</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	154.511.674,48	ADD, DLL, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.511.674,48	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.360.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.360.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	28.520.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	28.520.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	179.376.837,34	ADD, PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	179.376.837,34	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>34.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;ST NK;BPKB;dII)	9.000.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>14.450.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.450.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>108.490.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.250.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	35.350.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.350.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	31.640.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.640.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	25.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.92		Dukungan Peningkatan Perangkat Desa	6.250.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>110.018.150,00</b>	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	0,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	110.018.150,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.018.150,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>661.277.666,95</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>3.600.000,00</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.600.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>335.039.200,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.950.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	216.239.200,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.239.200,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	51.220.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.220.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.780.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.780.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	20.850.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>322.638.466,95</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	70.067.760,00	DDS, PBH
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.760,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	69.900.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	202.570.706,95	DDS, PBH
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	430.553,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	202.140.153,95	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	50.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>199.540.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	7.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	5.000.000,00	DDS
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>137.440.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	122.440.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.440.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	15.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>23.100.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	23.100.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>27.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>29.410.000,00</u></b>	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>16.150.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.150.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>13.260.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	13.260.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.260.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>82.000.000,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>10.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.232.254.328,77</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.443.823,23</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	229.556.176,77	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	280.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.443.823,23)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BALONGDOWO, 31 December 2025

PJ. KEPALA DESA BALONGDOWO

ARIEF DWI WINARKO, S.AP





# **PERATURAN KEPALA DESA BALONGDOWO**

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGDOWO TAHUN  
ANGGARAN 2026

**PEMERINTAH DESA BALONGDOWO**  
**KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2025**



KEPALA DESA BALONGDOWO  
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO  
PERATURAN KEPALA DESA BALONGDOWO  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGDOWO  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BALONGDOWO

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
  1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
27. Peraturan Desa Balongdowo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 6);
  28. Peraturan Desa Balongdowo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balongdowo Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Balongdowo Tahun 2021 Nomor 4);
  29. Peraturan Desa Balongdowo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Balongdowo Tahun 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALONGDOWO TAHUN ANGGARAN 2026

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 94.800.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.187.898.152,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.282.698.152,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1.260.026.661,82
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 661.277.666,95
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 199.540.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 29.410.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 82.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp 2.232.254.328,77
Surplus/Defisit	Rp 50.443.823,23
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 229.556.176,77
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 280.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (50.443.823,23)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Balongdowo

Pada tanggal : 25 December 2025

PJ. KEPALA DESA BALONGDOWO,



ARIE DWI WINARKO, S.AP

Diundangkan di : Balongdowo

Pada tanggal : 25 December 2025

SEKRETARIS DESA BALONGDOWO



MOCH. YATIM S.AP

BERITA DESA BALONGDOWO TAHUN 2026 NOMOR 08

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BALONGDOWO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			<b>94.800.000,00</b>	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			94.800.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			94.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>2.187.898.152,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			1.145.638.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.145.638.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			550.090.750,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			550.090.750,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			492.169.402,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			492.169.402,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>0,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.282.698.152,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
<b>01</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>1.260.026.661,82</b>	
<b>01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>993.068.511,82</b>	
<b>1.01.01.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>			<b>48.000.000,00</b>	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>48.000.000,00</b>	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			48.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			40.000.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			8.000.000,00	
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>			<b>424.800.000,00</b>	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>424.800.000,00</b>	ADD, DLL, PBH, PBK
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			424.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			354.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			70.800.000,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>			<b>154.511.674,48</b>	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>154.511.674,48</b>	ADD, DLL, PBH, PBK
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			50.619.674,48	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.535.430,21	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.712.430,00	
1.01.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			15.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			425.513,00	
1.01.04.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			1.946.301,27	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			64.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			55.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			18.400.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			14.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			21.292.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			13.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			5.892.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			0,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>			<b>69.000.000,00</b>	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>69.000.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			69.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			69.000.000,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>			<b>12.500.000,00</b>	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.500.000,00</b>	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			700.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.800.000,00	
1.01.06.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.000.000,00	
1.01.06.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.000.000,00	
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>			<b>42.000.000,00</b>	PBH
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>42.000.000,00</b>	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			42.000.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			42.000.000,00	
<b>1.01.08.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>			<b>34.360.000,00</b>	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>34.360.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			26.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			26.000.000,00	
1.01.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			8.360.000,00	
1.01.08.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			8.360.000,00	
<b>1.01.90.</b>		<b>Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa</b>			<b>28.520.000,00</b>	ADD, PAD, PBH
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>28.520.000,00</b>	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			28.520.000,00	
1.01.90.	5.1.1.90	Tunjangan Keluarga			4.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			18.500.000,00	
1.01.90.	5.1.1.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.90.	5.1.1.94	Uang Makan			3.520.000,00	
<b>1.01.91.</b>		<b>Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa</b>			<b>179.376.837,34</b>	ADD, PAD, PBH
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>179.376.837,34</b>	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			179.376.837,34	
1.01.91.	5.1.2.90	Tunjangan Keluarga			35.400.000,00	
1.01.91.	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			76.426.837,34	
1.01.91.	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			14.750.000,00	
1.01.91.	5.1.2.94	Uang Makan			52.800.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>34.000.000,00</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>			<b>25.000.000,00</b>	ADD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>25.000.000,00</b>	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			25.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			7.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			15.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.91.</b>		<b>Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;STNK;BPKB;dll)</b>			<b>9.000.000,00</b>	PBH
1.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.000.000,00</b>	
1.02.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00	
1.02.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			3.000.000,00	
1.02.91.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			6.000.000,00	
1.02.91.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			3.000.000,00	
1.02.91.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>14.450.000,00</b>	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>			<b>14.450.000,00</b>	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.450.000,00</b>	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.350.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			550.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.800.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.700.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.400.000,00	
1.03.02.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			2.400.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>108.490.000,00</b>	
<b>1.04.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>			<b>10.250.000,00</b>	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.250.000,00</b>	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.750.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.750.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00	
1.04.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			500.000,00	
<b>1.04.03.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dII)</b>			<b>35.350.000,00</b>	
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>35.350.000,00</b>	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.300.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.300.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.800.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.800.000,00	
1.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.250.000,00	
1.04.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.250.000,00	
<b>1.04.04.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dII)</b>			<b>31.640.000,00</b>	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>31.640.000,00</b>	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			15.740.000,00	
1.04.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			13.940.000,00	
1.04.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.800.000,00	
1.04.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			11.900.000,00	
1.04.04.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			11.900.000,00	
<b>1.04.10.</b>		<b>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &amp; BPD</b>			<b>25.000.000,00</b>	PBH
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.000.000,00</b>	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.000.000,00	
<b>1.04.92.</b>		<b>Dukungan Peningkatan Perangkat Desa</b>			<b>6.250.000,00</b>	PBH
1.04.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.250.000,00</b>	
1.04.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.150.000,00	
1.04.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.04.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
1.04.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
1.04.92.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pelantikan / Pengambilan Sumpah / Peng			2.000.000,00	
1.04.92.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			100.000,00	
1.04.92.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			100.000,00	
<b>01.05.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			<b>110.018.150,00</b>	
<b>1.05.90.</b>		<b>Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD</b>			<b>0,00</b>	PBH
1.05.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>0,00</b>	
1.05.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			0,00	
1.05.90.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			0,00	
<b>1.05.91.</b>		<b>Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>			<b>110.018.150,00</b>	PBH
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>110.018.150,00</b>	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.600.000,00	
1.05.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.600.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.000.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
1.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.200.000,00	
1.05.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
1.05.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			21.350.000,00	
1.05.91.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			9.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			12.000.000,00	
1.05.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			38.450.000,00	
1.05.91.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			36.400.000,00	
1.05.91.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.050.000,00	
1.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			33.418.150,00	
1.05.91.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			33.418.150,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>661.277.666,95</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>3.600.000,00</b>	
<b>2.01.02.</b>		<b>Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</b>			<b>3.600.000,00</b>	DDS
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000,00	
2.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
2.01.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>335.039.200,00</b>	
<b>2.02.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</b>			<b>7.950.000,00</b>	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.950.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.950.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
2.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00	
2.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			2.400.000,00	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</b>			<b>216.239.200,00</b>	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			216.239.200,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			194.039.200,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.100.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			9.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			122.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			57.739.200,00	DDS
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.200.000,00	
2.02.02.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			1.200.000,00	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>			<b>51.220.000,00</b>	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>51.220.000,00</b>	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.260.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.100.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.160.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
2.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			36.600.000,00	
2.02.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			36.600.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.360.000,00	
2.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			9.360.000,00	
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>			<b>38.780.000,00</b>	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>38.780.000,00</b>	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			28.160.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.350.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			26.310.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.220.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
2.02.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.220.000,00	
2.02.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			600.000,00	
2.02.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			600.000,00	
<b>2.02.90.</b>		<b>Penyelenggaraan Senam Desa</b>			<b>20.850.000,00</b>	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.850.000,00</b>	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.850.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.850.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00	
2.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			500.000,00	
2.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00	
2.02.90.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.500.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>322.638.466,95</b>	
<b>2.03.11.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)</b>			<b>70.067.760,00</b>	DDS, PBH
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>167.760,00</b>	
2.03.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			167.760,00	
2.03.11.	5.2.7.92	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			167.760,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			<b>69.900.000,00</b>	
2.03.11.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			2.690.000,00	
2.03.11.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			750.000,00	
2.03.11.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			1.940.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			67.210.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			22.355.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			44.105.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>			<b>202.570.706,95</b>	DDS, PBH
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>430.553,00</b>	
2.03.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			430.553,00	
2.03.14.	5.2.7.92	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			430.553,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			<b>202.140.153,95</b>	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			202.140.153,95	
2.03.14.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.400.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			70.071.343,95	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			124.268.810,00	
2.03.14.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			5.400.000,00	
<b>2.03.15.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)</b>			<b>50.000.000,00</b>	DDS
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			<b>50.000.000,00</b>	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			50.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			22.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			25.750.000,00	
2.03.15.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			1.500.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>199.540.000,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>12.000.000,00</b>	
<b>3.01.03.</b>		<b>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa</b>			<b>7.000.000,00</b>	PBH
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.000.000,00</b>	
3.01.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.000.000,00	
3.01.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			7.000.000,00	
<b>3.01.06.</b>		<b>Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin</b>			<b>5.000.000,00</b>	DDS
3.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
3.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			224.000,00	
3.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			776.000,00	
3.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.800.000,00	
3.01.06.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			3.000.000,00	
3.01.06.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			800.000,00	
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>137.440.000,00</b>	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>			<b>122.440.000,00</b>	DDS, PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>122.440.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			43.800.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.300.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			39.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			72.640.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			67.840.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			4.800.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			6.000.000,00	
<b>3.02.90.</b>		<b>Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)</b>			<b>15.000.000,00</b>	PBH
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.000.000,00</b>	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
3.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			15.000.000,00	
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>23.100.000,00</b>	
<b>3.03.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</b>			<b>23.100.000,00</b>	DDS
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>23.100.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.600.000,00	
3.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
3.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.500.000,00	
3.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
3.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			6.000.000,00	
3.03.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.000.000,00	
3.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
3.03.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6.000.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>27.000.000,00</b>	
<b>3.04.02.</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>			<b>7.000.000,00</b>	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.300.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.700.000,00	
3.04.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			2.700.000,00	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>			<b>20.000.000,00</b>	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.600.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>29.410.000,00</b>	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>16.150.000,00</b>	
<b>4.04.01.</b>		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>			<b>16.150.000,00</b>	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>16.150.000,00</b>	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.950.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.800.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.050.000,00	
4.04.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.050.000,00	
4.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.150.000,00	
4.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			9.150.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>13.260.000,00</b>	
<b>4.05.01.</b>		<b>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</b>			<b>13.260.000,00</b>	DDS
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>13.260.000,00</b>	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.110.000,00	
4.05.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.05.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.960.000,00	
4.05.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
4.05.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
4.05.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.050.000,00	
4.05.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.050.000,00	
4.05.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.100.000,00	
4.05.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6.100.000,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>82.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
05.02.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			10.000.000,00	
5.02.00.		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>			10.000.000,00	DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
05.03.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			72.000.000,00	
5.03.00.		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>			72.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			72.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			72.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.232.254.328,77</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>50.443.823,23</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			229.556.176,77	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			229.556.176,77	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			229.556.176,77	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			280.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			280.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			280.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>50.443.823,23</b>	
		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

BALONGDOWO, 31 December 2025

PJ. KEPALA DESA BALONGDOWO

ARIEF DWI WINARKO, S.AP

